

**LAPORAN PENELITIAN****FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**"ANALISA HUKUM TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN  
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN UNDANG-UNDANG NO.  
20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI"**

Oleh :

Ketua : I. Tajudin, SH. MH.

Anggota : 1. Adipati Permana Parawatha.  
2. Sabrina Sibarani.

Dibiayai oleh Dana BLU Universitas Padjadjaran  
Tahun Anggaran 2012

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran  
Nomor : 1665/UN6.A/KP/2012  
Tanggal 26 Juni 2012



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
TAHUN 2012**

**LAPORAN PENELITIAN**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**"ANALISA HUKUM TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN  
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN UNDANG-UNDANG NO.  
20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI"**

Oleh :

Ketua : I. Tajudin, SH. MH.

Anggota : 1. Adipati Permana Parawatha.  
2. Sabrina Sibarani.

Dibiayai oleh Dana BLU Universitas Padjadjaran

Tahun Anggaran 2012

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran

Nomor : 1665/UN6.A/KP/2012

Tanggal 26 Juni 2012




**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
TAHUN 2012**




**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN AKHIR PENELITIAN FAKULTAS HUKUM UNPAD**  
**SUMBER DANA BLU UNIVERSITAS PADJADJARAN**

1. Judul Penelitian : "Analisa hukum terhadap penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dihubungkan dengan undang-undang no. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi"
  
2. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap dan Gelar : I.Tajudin,SH.MH.
  - b. Jenis kelamin : Laki-laki.
  - c. Pangkat/Gol/NIP : Penata Muda TK I/III B/19770411 200501 1 003.
  - d. Jabatan Fungsional : Lektor
  - e. Bidang Ilmu yang diteliti : Hukum Pidana/Hukum Acara Pidana
  
3. Jumlah Tim Peneliti : 2
  - Anggota 1 : Adipati Permana Parawatha/NPM : 110110080375 (mahasiswa)
  - Anggota 2 : Sabrina sibarani/ NPM: 110110070613 (mahasiswa)
  
4. Lokasi Penelitian : Bandung,Jakarta
  
5. Bila penelitian ini merupakan peningkatan kerja sama kelembagaan sebutkan:
  - a. Nama Instansi :
  - b. Alamat :
  
6. Jangka waktu penelitian : 6 (enam) bulan
  
7. Biaya Penelitian : Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)


Menyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran

  
Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H.  
NIP. 19620728 198701 2 001

Bandung, Desember 2012  
Ketua Peneliti,

  
I. Tajudin, S.H. M.H.  
NIP. 19770411 200501 1 003

Mengetahui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Padjadjaran

  
Prof. Dr. Wawan Hermawan, MS  
NIP. 19620527 198810 1 001

## ABSTRAK

Tindak pidana korupsi sekarang ini telah memasuki semua bidang kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan pelakunya pun berasal dari berbagai latar belakang profesi, baik kalangan menengah ke atas maupun masyarakat yang masih tergolong berpenghasilan rendah. Pemberantasan terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih mengecewakan masyarakat, vonis terhadap pelaku korupsi masih dianggap rendah tidak sebanding dengan besarnya jumlah kerugian keuangan negara. sekarang ini masyarakat berharap diterapkannya undang-undang tindak pidana pencucian uang sekaligus dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk menjerat pelaku korupsi, namun para penegak hukum masih kesulitan dalam proses pembuktian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang sekaligus dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya memberantas Tindak pidana korupsi, hambatan-hambatan dan upaya penanggulangannya.

Penelitian ini menggunakan yuridis normative, dengan metode pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini dikaji dengan data kepustakaan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta membahas penerapan undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang sekaligus dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya memberantas Tindak pidana korupsi, hambatan-hambatan dan upaya penanggulangannya.

Penerapan Undang-undang tindak pidana pencucian uang sekaligus dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum, apalagi setelah keluarnya Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang memberikan ruang bagi setiap penyidik tindak pidana asal (*predicate crime*) untuk melakukan penyidikan TPPU. Penerapan dakwaan kumulatif antara undang-undang TPPU dengan undang-undang pemberantasan Tindak Pidana korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi diharapkan akan membawa dampak penurunan kualitas dan kuantitas tindak pidana korupsi yang terjadi, karena vonis yang dijatuhkan terbilang tinggi, disertai adanya penyitaan asset/kekayaan pelaku terkait hasil tindak pidana korupsi, yang akan membuat efek jera dan meminimalisir orang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hambatan-hambatan dalam penerapan sekaligus Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yaitu Pembuktian untuk korupsi dan pencucian uang memang agak rumit, modus operandinya yang canggih, transaksi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang secara tunai. Upaya penanggulangannya, Penguatan kemampuan SDM penegak hukum, kerjasama yang erat antara penyidik, PPATK dan penyedia Jasa Keuangan, pengisian LHKPN harus selalu terus di update dan dipublikasikan kepada masyarakat tentang perubahan harta kekayaan yang dimiliki oleh para pejabat Negara, serta dibentuknya aturan BI untuk mengurangi transaksi keuangan secara tunai.

Kata Kunci: *penerapan, Tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi.*



## ABSTRACT

Recently, corruption act has penetrated in every field Indonesian society, the perpetrator comes from various professional backgrounds among upper, middle or lower class. Eradication of corruption actors is still disappointing public, the verdict is still low compared to financial state loss. Now, the public needs the government to implement both regulations on corruption act and money laundering act to combat corruption, however the law enforcement agent still faces difficulties to process the crimes especially to prove the evidence. The aims of this research are to determine the implementation, the barriers and an effort to combat corruption through corruption act and money laundering act.

This research uses juridical normative, and normative analytical approach. This research examined the data library using primary, secondary and tertiary legal materials. This research discusses the implementation, the barriers and an effort to combat corruption through corruption act and money laundering act.

The implementation of corruption act and money laundering act to the perpetrator already done by law enforcement. Money laundering act (Law number 8 year 2010) provides space for the investigator to investigate money laundering. Implementation of cumulative charges for corruption act and money laundering act are expected to decrease quantity and quality of corruption offences through high punishment and asset forfeiture/confiscation which would create a deterrent effect and prevent society to commit corruption. The barriers of implementation of corruption act and money laundering act are the proof process for corruption and money laundering is complicated because the modus, type of transaction etc. The solutions are strengthening the human resources capacity, support cooperation among investigator, PPATK and financial service providers; continuing updating LHKPN data and publishing to public, and encouraging BI to decrease cash transaction.

**Key words:** implementation, money laundering, corruption

## Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas segala karunia serta kehendaknya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan dengan judul:

**"ANALISA HUKUM TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI"**

Dengan segala keterbatasan yang kami miliki, tentunya hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna baik di dalam cara penulisan maupun materi yang disajikan. Untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan sehingga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak terkait.

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Yth. Ibu Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang telah memberikan kesempatan dan waktu bagi tim peneliti untuk memilih judul ini.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian, sehingga proses maupun pelaksanaan penelitian dapat dilakukan dengan baik.

Bandung, Desember 2012

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	1
A.latar belakang	1
B.Permasalahan Hukum	7
C.Tujuan penelitian	7
D.jadwal pelaksanaan	9
E.personalia peneliti	10
F.lokasi penelitian	10
Bab II Tinjauan Pustaka	11
Bab III Metode Penelitian	22
Bab IV Hasil Pembahasan	25
Bab V Simpulan dan Saran	49
Daftar Pustaka	51



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi sekarang ini telah memasuki semua bidang kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan pelakunya pun berasal dari berbagai latar belakang profesi, baik kalangan menengah ke atas maupun masyarakat yang masih tergolong berpenghasilan rendah. Korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja, dalam bidang apa saja, bahkan sekarang ini, terjadi pada orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, baik yang berada pada lembaga eksekutif, yudikatif, legislative. Tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat, tetapi sudah meluas ke pemerintahan yang berada di daerah.

Pemberantasan tindak pidana korupsi telah gencar dilakukan oleh aparat penegak hukum, tiap hari kita dapat melihat dan menyaksikan baik melalui media visual maupun media cetak tentang penangkapan dan proses persidangan pelaku tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan maupun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, bahkan secara kelembagaan, hal ini telah diperkuat dengan dibentuknya pengadilan khusus tindak pidana korupsi sebagaimana amanat Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Harus kita akui bahwa sekarang ini proses pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi telah mengalami peningkatan, terlihat dari laporan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak hanya dapat menghukum para pelaku tindak pidana korupsi, namun juga telah berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara. Selama kurun waktu 4 bulan, dari Januari-April 2012, Kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan masuk ke dalam penerimaan negara, bukan pajak (PNBP), telah disetorkan ke dalam rekening kas negara atau daerah, total uang negara